



MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

MASALAH-MASALAH PEMBANGUNAN DI INDONESIA

**Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan
dan Upaya Mewujudkannya**
Eko Supeno

***Citizen's Charter* dalam Paradigma Administrasi Negara :
Reorientasi Pelayanan Publik**
Erna Setijaningrum

**Paradigma Perpolisian Komunitas:
Mengantisipasi Konflik Sosial Pemilihan Kepala Daerah**
Hotman Siahaan

**Refleksi
Gerakan Rakyat Lereng Gunung Semeru di Era Reformasi 1997**
Mustain Mashud

**Kalangan Marjinal di Perkotaan:
Studi Perlawanan Ex. Pedagang Kaki Lima Taman Surya Surabaya**
Karnaji

**Analisis Reseptif Sosok Savitri dalam Novel Primadona
Karya Achmad Munif dari Dimensi Feminisme Eksistensial**
Heru Supriyadi

**Peluang dan Tantangan Penerapan E-governance
dalam Konteks Otonomi Daerah**
Sri Yuni Woro Astuti

**Resensi Buku
Membunuh Atas Nama Kebebasan: The Silent Takeover**
Helmy Prasetyo Yuwinanto

MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif

Pemimpin Umum

Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum

I. Basis Susilo

Penanggungjawab

Kris Nugroho

Dewan Redaksi

Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)

Ramlan Surbakti (Unair)

Daniel Theodore Sparringa (Unair)

Mohtar Mas'ood (UGM)

Ashadi Siregar (UGM)

Herudjati Purwoko (Undip)

Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi

Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi

Harijono

Redaksi Pelaksana

Bagong Suyanto

Yuyun Wahyu Izzati

Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran

Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981

ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi : FISIP Unair Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

Telepon: 031-5034015, Fax: 031-5022492

e-mail : mkp@sby.centrin.net.id

PENGANTAR REDAKSI

Permasalahan pembangunan tidak akan pernah berhenti, dengan berkaca pada pengalaman masa lalu mulai Orde Lama, Orde Baru, sampai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tercatat berbagai paradigma pembangunan pernah diterapkan di Indonesia. Namun, upaya penyelesaian dampak dari hasil-hasil pembangunan tidak pernah berhasil. Apakah kesalahan tersebut bersumber dari ketidakberesan manajemen pengelolaan hasil pembangunan yang notabene dari aparat pemerintah, apakah dari masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan, atautkah sistem yang dianut pemerintah –yang lagi-lagi dianggap sebagai sumber permasalahan.

Namun demikian, permasalahan pembangunan tidaklah cukup diselesaikan dan dipecahkan dengan menggunakan satu dimensi saja, permasalahan pembangunan harus multidimensi, sebab semua komponen bersinergi dan dilakukan secara komprehensif tidak asal-asalan, tidak parsial. Redaksi berupaya untuk menyajikan berbagai ulasan permasalahan pembangunan dari banyak segi, sehingga apa yang terjadi ke depan dicoba untuk ditelaah dan diprediksi dengan berkaca pada keberhasilan dan kegagalan yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan terdahulu. Dari pandangan administrasi Eko Supeno mengemukakan gagasannya melalui tulisan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan dan Upaya Mewujudkannya, dan *Citizen's Charter* dalam Paradigma Administrasi Negara: Reorientasi Pelayanan Publik ditulis Erna Setijaningrum. Pandangan sosiologis tentang Paradigma Perpolisian Komunitas: Mengantisipasi Konflik Sosial Pemilihan Kepala Daerah dikemukakan Hotman Siahaan serta Refleksi Gerakan Rakyat Lereng Gunung Semeru di Era Reformasi 1997 diulas oleh Mustain Mashud. Sri Yuni Woro Astuti membuka wawasan dengan tulisan Peluang dan Tantangan Penerapan E-Governance dalam Konteks Otonomi Daerah, sedangkan Kalangan Marjinal di Perkotaan: Studi Perlawanan Ex. Pedagang Kaki Lima Aman Surya Surabaya ditulis Karnaji. Redaksi juga menerima tulisan berkaitan dengan sastra yaitu Analisis Resepsi Sosok Savitri dalam Novel Primadona karya Achmad Munif dari Dimensi Feminisme Eksistensial oleh Heru Supriyadi. Resensi buku pada edisi kali ini ditulis oleh Helmy Prasetyo Yuwinanto dari buku Membunuh Atas Nama Kebebasan.

Redaksi berharap semoga kehadiran jurnal ilmiah *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ini dapat memberikan alternatif pemikiran serta menambah wawasan dan sekaligus menjadi media interaksi yang dapat menjembatani para ahli, ilmuwan sosial, pemerhati masalah sosial-politik dan berbagai pihak terkait dalam mengkomunikasikan gagasan serta ide untuk pembangunan serta perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah.

Redaksi

Topik Utama Edisi No. 3 (Juli) 2005:
PILKADA dan Permasalahannya

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

iii

Daftar Isi

v

Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan dan Upaya Mewujudkannya

Eko Supeno

1

***Citizen's Charter* dalam Paradigma Administrasi Negara : Reorientasi Pelayanan Publik**

Erna Setijaningrum

7

Paradigma Perpolisian Komunitas: Mengantisipasi Konflik Sosial Pemilihan Kepala Daerah

Hotman Siahaan

21

Refleksi

Gerakan Rakyat Lereng Gunung Semeru di Era Reformasi 1997

Mustain Mashud

43

Kalangan Marjinal di Perkotaan: Studi Perlawanan Ex. Pedagang Kaki Lima Taman Surya Surabaya

Karnaji

63

Analisis Reseptif Sosok Savitri dalam Novel Primadona Karya Achmad Munif dari Dimensi Feminisme Eksistensial

Heru Supriyadi

83

Peluang dan Tantangan Penerapan E-governance dalam Konteks Otonomi Daerah

Sri Yuni Woro Astuti

93

Resensi Buku

Membunuh Atas Nama Kebebasan: The Silent Takeover

Helmy Prasetyo Yuwinanto

111

Resensi Buku

MEMBUNUH ATAS NAMA KEBEBASAN The Silent Takeover

Penulis : Dr. Noreena Hertz
Penerbit : Nuansa, Bandung
Cetakan : Pertama, Mei 2004
Tebal : xxiv + 295 halaman

Peresensi : Helmy Prasetyo Yuwinanto
Dosen Jurusan Ilmu Informasi dan Perpustakaan FISIP Unair

Globalisasi dan kapitalisme adalah tema sentral yang diangkat oleh Dr. Noreena Hertz dalam buku yang berjudul asli *The Silent Takeover*, siapa yang tidak tahu dan tidak paham atas globalisasi dan kapitalisme. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa mencegah dan menghentikan lajunya pengaruh kapitalisme dan globalisasi. Seberapa pun kekuatan yang digunakan untuk membendung pengaruh tersebut, sekuat itu pula kapitalisme dan globalisasi akan masuk —entah sadar atau tidak— perlahan namun pasti hampir seluruh negara di dunia terkena imbas pengaruh globalisasi. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa globalisasi adalah identik dengan Mc Donaldisasi, Coca Cola, Levis, dan berbagai produk barat lainnya yang terpampang dalam pariwisata media cetak maupun elektronik.

Sekilas tentang Dr. Noreena Hertz adalah seorang pakar dalam bidang globalisasi ekonomi. Ia memulai karirnya sebagai seorang ahli Rusia dan bekerja pada Bank Dunia pada tahun 1992, menjadi staf ahli mengenai langkah-

langkah reformasi Rusia. Pada pertengahan dasawarsa sembilan puluhan ia bekerja pada proses Perdamaian Timur Tengah dengan Otoritas Palestina dan Pemerintahan Israel, Yordania, Mesir.

Buku Membunuh Atas Nama Kebebasan ini merupakan pokok pikiran Dr. Noreena Hertz yang menerangkan bagaimana korporasi di seluruh dunia memperdayai dan menekan pemerintah negara-negara di dunia dengan cara legal maupun ilegal, bagaimana protes menjadi sarana politik yang efektif daripada kotak suara, dan bagaimana korporasi mengambil alih dari tanggung jawab terhadap segala sesuatu dan menyediakan teknologi bagi sekolah hingga perawatan kesehatan bagi masyarakat.

Kalau dirunut menurut ulasan sejarah, kehadiran globalisasi adalah imbas dari kegagalan paradigma *developmentalism* yang diterapkan di negara dunia ketiga, ironisnya kegagalan ini menimpa pada negara-negara yang dianggap paling sukses dan paling banyak diadopsi oleh penganut paradigma pembangunan, ambil contoh Korea Selatan, Taiwan, Thailand,

Malaysia serta Indonesia. Globalisasi ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme yang kian terbuka dan mengglobalnya peran mekanisme pasar, investasi, dan proses produksi dari perusahaan transnasional yang kemudian dikuatkan oleh ideologi dan tata perdagangan dunia baru di bawah aturan yang ditetapkan oleh organisasi perdagangan bebas secara global. (Fakih, Mansour., *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar, 2001: 197-198).

Namun, demikian kehadiran globalisasi bukan tanpa ancaman. Semenjak ditandatanganinya kesepakatan internasional tentang perdagangan pada bulan April 1994 di Marrakesh, Maroko yang dikenal dengan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) di mana GATT ini merupakan forum negosiasi perdagangan antar pemerintah, serta pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan dagang antar bangsa. Kemudian, pada tahun 1995 suatu organisasi pengawasan perdagangan dan kontrol perdagangan dunia *World Trade Organization* (WTO) mengambil alih peran GATT, semenjak itu pula negara-negara yang hadir masuk dalam pusaran globalisasi. Kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat ternyata memaksakan keinginan perusahaan transnasional ke dalam kebijakan negara dengan mengusung isu lingkungan, reformasi atas tanah, mekanisme pasar. Implikasi perubahan kebijakan nasional yang lebih memihak perusahaan transnasional tidak saja memarjinalkan mayoritas masyarakat miskin, namun juga perhadapan dengan kepentingan nasib petani kecil, nelayan,

pedagang sektor informal serta masyarakat adat, khususnya dalam hal perebutan sumber daya alam terutama tanah, hutan, dan laut.

Globalisasi terlahir bukan tanpa tantangan, semenjak GATT dan kesepakatan dengan WTO ditandatangani berbagai tantangan dan resistensi bangkit untuk melakukan —setidaknya perlawanan— dengan melakukan upaya sebagai berikut:

Pertama, tantangan dari gerakan kultural dan agama dengan label yang bermacam-macam, dari agama munculnya fundamentalisme Islam di Mesir maupun negara-negara Islam, dari gerakan kultural muncul kelompok Hindu Revivalis di India dan sebagainya. *Kedua*, tantangan dari *New Social Movement* dan *Global Civil Society*. Gerakan ini menentang pembangunan dan globalisasi seperti gerakan hijau, feminisme, gerakan akar rumput. *Ketiga*, gerakan lingkungan terhadap globalisasi dengan keprihatinan atas rusaknya ekosistem hasil industri perusahaan transnasional. (Fakih: 2001, 224-225).

Buku ini merupakan terjemahan dari tulisan aslinya *The Silent Takeover* yang dicoba untuk dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, sebelumnya buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis, Jerman, Cina, Ceko, Spanyol, Italia, Belanda, Korea, Portugis dan Jepang. Hal ini menandakan isu kapitalisme dan globalisasi yang ditulis Noreena Hertz demikian penting dan mendesak untuk diketahui masyarakat luas seluas pengaruh globalisasi ke berbagai negara. Bahkan dalam bukunya sendiri Noreena Hertz tanpa malu-malu menjadikan buku ini sebagai pro-rakyat, pro-demokrasi dan pro-keadilan.

“Saya bermaksud mempertanyakan suatu justifikasi moral bagi sebuah cabang kapitalisme yang mendorong pemerintah untuk menjual warganya dengan harga yang sangat murah, untuk menguji legitimasi atas sebuah dunia yang menderita banyak kerugian dan memetik sedikit keuntungan, untuk mengungkap bagaimana pengambilalihan itu membahayakan demokrasi, dan untuk mempertahankan bahwa terdapat paradoks mendasar pada jantung kapitalisme leha-leha, bahwa dengan menyempitkan negara pada fungsinya yang sangat minimal dan meletakkan korporasi pada jantung kehidupan berarti negara menghadapi resiko merusak legitimasinya sendiri”. (hal: 21)

Beberapa gambaran yang cukup mengerikan dan merupakan ciri kapitalisme global diungkap dengan contoh salah satu negara yang mencoba untuk mengadopsi sistem tersebut. Seperti pemerintah Nigeria sebagai misal, perusahaan minyak Shell menghabiskan dana sebesar \$52 juta pada tahun 1999 untuk sebuah program investasi sosial, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan dan jembatan sembari memasok aliran listrik dan air yang ditelantarkan pemerintah pada dasawarsa 1980-an. Apa yang terjadi, pemerintah berada dalam bisnis minyak dan Shell berada dalam pemerintah lokal. Pada masa lalu, 70% atau lebih penghasilan tinggi dari proyek minyak dikeluarkan untuk membayar pajak dan royalti kepada pemerintah, dan ada klaim bahwa Shell sendiri bertanggung jawab atas tiga perempat penghasilan pemerintah Nigeria atau sekitar sepertiga GNP negeri itu. Namun, banyak dari uang tersebut lari ke rekening-rekening bank luar negeri, hampir tidak ada yang digunakan

untuk membangun Nigeria demi orang-orang Nigeria, korupsi waktu itu sungguh berlaku universal. (hal: 238-239).

Selain itu, berbagai lembaga riset milik pemerintah maupun universitas tidak luput dari sokongan dana agar berbagai kasus perusahaan tidak mencuat kepermukaan, bahkan lembaga agama pun tidak bisa lolos seperti laporan WHO, Philip Morris berupaya mengidentifikasi dan menggalang dukungan bagi para pemimpin keagamaan Islam yang menentang penafsiran Al Qur'an yang memiliki potensi mengharamkan rokok. Sungguh tidak ada yang sakral dalam kapitalisme global. Laporan anggota Konggres Independen di Amerika menyesalkan kepentingan perusahaan tetap bermain, “FDA membiarkan pengaruh perusahaan berjalan merajalela untuk memberikan persetujuan pada obat-obatan. Aturan kode etik sering tersingkir dan dilanggar pada banyak kesempatan (hal: 203).

Buku ini terdiri dari 11 bab, namun bangunan rangkaian isi dari masing-masing bab terkesan saling lepas, tidak ada satu kaitan antara bab pertama, kedua sampai bab terakhir. Tetapi pada tiap bab, sebelum berakhir ada beberapa penjelasan dan argumentasi dari penulis mengenai uraian pokok dari bab yang dimaksud, sehingga pembaca perlu mendalami terlebih dahulu awal bab sampai bagian pertengahan agar mampu memahami bagian akhir dari bab yang sedang dibaca.

Pada bab terakhir buku ini, penulis mencoba untuk mengungkapkan idenya tentang perlunya Agenda Baru, di mana dengan keyakinannya Noreena Hertz mencoba untuk merumuskan agar setiap orang mampu memiliki akses terhadap keadilan;

Pertama, pada tingkat nasional perlu pencabutan hak memilih dari perusahaan. Pendanaan perusahaan terhadap partai-partai politik dan kampanye-kampanye pemilihan merupakan suatu penghinaan bagi prinsip-prinsip demokrasi.

Kedua, kepercayaan yang teguh terhadap ekonomi *trickle-down*. Ketimpangan yang terus tumbuh dan kecenderungan perusahaan untuk menangkap penghasilan dari subsidi atau potongan pajak tanpa memperhatikan komunitas setempat secepatnya dihentikan.

Ketiga, kekuasaan perusahaan pada tingkat nasional harus dihambat. Adanya pembatasan kepemilikan silang dengan mensyaratkan pelaporan wajib mengenai isu yang berkaitan dengan lingkungan dan masyarakat. Pendek kata transparansi dan akuntabilitas publik sangat dibutuhkan agar aktifitas kekuasaan dan kewenangan perusahaan dapat dikontrol dan diawasi publik. (hal: 290-291)

Berkaitan dengan hal di atas, perlu langkah jangka pendek yang segera diambil antara lain:

Pertama, pemerintah harus punya komitmen terhadap reformasi badan legislatif yang akan memastikan bahwa tabis perusahaan dapat ditembus dan perusahaan-perusahaan induk multinasional dapat dimintai pertanggungjawabannya atas berbagai tindakan bawahannya di negeri manapun mereka beroperasi. *Kedua*, para pekerja dan komunitas di

mana saja harus diberikan akses terhadap lembaga bantuan hukum global. *Ketiga*, perlu adanya lembaga WSO (*World Social Organization*) sebagai tandingan WTO yang akan melakukan penetapan berbagai peraturan dan regulasi tentang mekanisme pasar global dan memastikan perlindungan jangka panjang atas hak asasi manusia, standar perburuhan dan lingkungan. (hal: 292)

Bolehlah berharap bahwa lembaga WSO ini memiliki taji dan gigi yang tajam supaya tidak jadi macan kertas, agar kehadiran lembaga tersebut tidak sia-sia atau bahkan menjadi partner atau sekutu dengan WTO, kalau kejadiannya semacam ini boleh jadi akan menambah runyam daftar organisasi yang sudah terkooptasi lembaga semacam WTO, NAFTA, GATT, APEC dan sebagainya.

Tulisan Dr. Noreena Hertz yang diterjemahkan ini patut dihargai dan menjadi sangat penting di tengah maraknya ketidakmampuan paradigma pembangunan yang dianut pemerintah Indonesia lewat buku ini penulis mampu menyajikan pokok bahasan yang cukup menarik dan mendalam dengan kemampuannya merakit berbagai gagasan (baik teoritis maupun empiris). Namun bagaimanapun dan apapun isi buku ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi para pemerhati, mahasiswa, dosen, pakar yang akan mendalami masalah seputar pembangunan dan dampaknya secara khusus, mendalam serta komprehensif agar dapat menambah khazanah ilmu dan penerapannya.